KARAKTERISTIK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Frannanda

Email: Frananda659@gmail.com

No BP: 2010003600214

Universitas Eka Sakti

A. PENDAHULUAN

Indonesia sering dikenal dan disebut sebagai negara hukum, hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi terhadap azas kesejahteraan dimana kesejahteraan tersebut tidak memandang terhadap kasta, harta bahkan tahta seseorang. Secara sederhana tujuan dari negara hukum dapat diartikan sebagai wujud yang mementingkan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Bicara tentang perlindungan hukum, Indonesia sendiri menganut 2 prinsip perlindungan hukum yaitu: **Pertama** (prinsip hak asasi manusia) dan **Kedua** (prinsip negara hukum). Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Tanpa kita pungkiri bersama, ketika bicara tentang sebuah perlindungan dan keadilan banyak hal yang saling berkaitan dan membutuhkan sebuah penanganan yang serius dari pengak hukum di Indonesia. Salah satu keadilan yang sering diusik oleh masyarakat terkait sengketa tata usaha negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 6 UU Peradilan TUN, pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara peradilan TUN adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan Sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak hanya ingin tau luarnya saja dari pengadilan Tata Usaha Negara oleh karna itu, pada makalah ini kita akan membahas mengenai ***Karakteristik Beracara di Pengadilan Tata usaha Negara.***

B. PEMBAHASAN

Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan pemebentukan PTUN seperti terdapat dalam pertimbangan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga tercermin dalam Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 25 April 1986 yang menyebutkan tujuan pembentukan PTUN adalah ; Pertama; Memberikan perlindungan hak- hak rakyat yang bersumber pada hak – hak individu ; Kedua, Memberikan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke PTUN. Dalam PTUN, seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dipercaya telah merugikan individu dan atau masyarakat. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

Untuk melakukan control terhadap tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik harus memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut :

1. ***Sifat atau karakteristik*** dari suatu keputusan TUN yang selalu mengandung asas *praesumptio iustae causa* , yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan ;
2. ***Asas perlindungan*** terhadap kepentingan umum atau public yang menonjol disamping perlindungan terhadap individu ;
3. ***Asas self respect atau self obedience*** dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan peradilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya paksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata.

Penggabungan antara hukum materiil dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan lainnya. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara ini, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang merupakan ciri atau karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pembeda dengan peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata), sebagai berikut:

- a. Adanya tenggang waktu mengajukan gugatan (Pasal 55)
- b. Terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam Pelitum gugatan penggugat (Pasal 53)
- c. Adanya proses dismissal (rapat permusyawaratan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 62).
- d. Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 63)
- e. Peranan hakim TUN yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil (Pasal 63,80,85,95, dan 103)
- f. Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, oleh karenanya “kompensasi” perlu diberikan karena kedudukan penggugat diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- g. Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas (Pasal 107).
- h. Gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67).

- i. Putusan hakim yang tidak boleh bersifat ultra petita yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatan penggugat, akan tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat pada keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
- j. Putusan hakim TUN yang bersifat erga omnes, artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lainnya yang terkait.
- k. Berlakunya asas audit alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Selain karakteristik tersebut, perlu ditegaskan bahwa Peratun pada dasarnya menegakkan hukum publik, yakni Hukum Administrasi sebagaimana ditegaskan dalam UU Peratun Pasal 47, bahwa sengketa termasuk lingkup kewenangan Peratun adalah sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan tentang KTUN (Pasal 1 angka 9) yang mensyaratkan juga tindakan Hukum Tata Usaha untuk adanya KTUN.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang: “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “(vide Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa menjadi subjek di Peratun adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. Sementara itu, yang menjadi objek di Peratun adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).

Ciri utama Hukum Acara Peradilan TUN di Indonesia hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materialnya yaitu dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, jo UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN). Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha:

1. **Negara** yaitu antara lain sebagai berikut; Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 103 ayat (1), Pasal 107.
2. **Sistem pembuktian** mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas (Indroharto, 1996:189).
3. **Gugatan di Pengadilan TUN tidak bersifat menunda** Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (vide Pasal 67). Hal ini terkait dengan dianutnya azas Presumptio Justae Causa dalam Hukum Administrasi Negara, yang berarti adalah bahwa suatu Keputusan TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada Putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.
4. **Terhadap Putusan Hakim Pengadilan TUN berlaku asas erga omnes**, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.

5. *Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem* yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum Hakim memberikan putusan.
6. *Dimungkinkan adanya peradilan in absentia* tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2). Hukum Acara TUN 7
7. Adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan antara lain :
 - a. Bagi yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu panitera pengadilan dalam merumuskan gugatannya.
 - b. Bagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk beracara secara cuma-cuma.
 - c. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan yang berwenang mengadilinya.
 - d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan TUN yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya.
 - e. Badan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk datang sendiri.

C. PENUTUP

Berdasarkan Uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai karakteristik Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara Umum Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Adapun karakteristiknya sebagai berikut: 1). Adanya tenggang waktu mengajukan gugatan; 2). Terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam Pelitum gugatan penggugat; 3). Adanya proses dismissal (rapat permusyawaratan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; 4). Dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum; 5). Peranan hakim TUN yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil; 6). Kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat; 7). Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas; 8). Gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; 9). Putusan hakim yang tidak boleh bersifat *ultra petita*; 10). Putusan hakim TUN yang bersifat *erga omnes*; 11). Berlakunya asas *audit alteram partem*.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..